

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Teori *stewardship* berkembang akibat adanya ketidakpuasan dan keegoisan serta adanya bentrokan antara *principal* dan *agent* dalam teori keagenan (*agency theory*) (Schillemans, 2013). Davis, Schoorman and Donaldson (1997:22) menyatakan bahwa teori *stewardship* mendefinisikan situasi di mana manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan sebagai pengelola yang motivasinya selaras dengan tujuan principal mereka. Ketika ada perbedaan antara kepentingan pemilik dan *steward* maka *steward* akan berusaha untuk bekerja sama daripada melawan. Teori ini mengindikasikan adanya hubungan yang kuat antara kesuksesan sebuah organisasi dan kepuasan pemilik organisasi, sehingga manajer akan mengikuti tujuan dari pemilik organisasi (Raharjo, 2007).

Perbedaan utama antara *agency theory* dan *stewardship theory* terletak pada motivasi agen. Dalam *agency theory* fokus motivasi adalah motivasi eksternal yaitu komoditas yang bisa dipertukarkan dan diukur menggunakan harga pasar. Sedangkan *stewardship theory* lebih menggunakan fokus intrinsik yang tidak dapat diukur atau dinilai. Imbalan dalam *stewardship theory* berupa kesempatan tumbuh, aktualisasi diri dan keanggotaan

(Raharjo,2007). *Stewardship theory* berusaha untuk memahami kualitas pelayanan yang baik yang harus dimiliki sehingga mengubah perspektif tentang hubungan antara “*principal*” dan “*agent*” (Schillemans, 2013).

Berdasarkan penelitian dari Rashidpour dan Mazaheri (2013) dalam Susanto, Yusuf & Rachmawati (2015) menyimpulkan bahwa berkaitan dengan manajemen lembaga atau organisasi sektor publik, teori *stewardship* lebih sesuai digunakan dibandingkan teori keagenan (*agency theory*). Dalam teori *stewardship* rakyat berperan sebagai “*principal*” sedangkan pemerintah berperan sebagai “*steward*”. Menurut teori *stewardship* pemerintah dianggap telah bekerja atas dasar motivasi pengabdian dan pelayanan terhadap rakyat (Susanto, Yusuf & Rachmawati 1, 2015).

Rakyat secara langsung akan menyelenggarakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah sehingga membutuhkan informasi yang dapat mendukung proses pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah wajib mengungkapkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mahmud & Waliyyani, 2015).

2. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Mengutip dari Spence (2002) dalam Connelly, Certo, Ireland, & Reutzel (2011) teori sinyal (*signaling theory*) pada dasarnya berkaitan untuk mengurangi asimetri informasi antara dua pihak. Teori sinyal (*signaling theory*) menjelaskan tentang bagaimana semestinya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan berupa informasi

mengenai kinerja manajemen dalam mewujudkan keinginan pemilik. Manajemen akan mengungkapkan informasi yang mampu meningkatkan tingkat kredibilitas serta kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak termasuk dalam informasi yang diwajibkan. Salah satu contoh sinyal positif adalah pengungkapan secara sukarela (Nuswandari, 2009).

Menurut Wolk et al (2001) yang dikutip dari Jama'an (2008) berdasarkan *signaling theory* alasan mengapa perusahaan terdorong untuk menyampaikan informasi dalam laporan keuangan kepada pihak eksternal karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan adanya perbedaan jumlah informasi yang dimiliki oleh perusahaan dan pihak luar. Perusahaan sebagai *agent* dianggap memiliki informasi yang lebih mengenai kinerja serta prospek perusahaan apabila dibandingkan dengan pihak luar (investor/kreditor) sebagai *principal*. Pemberian sinyal baik terhadap pihak luar merupakan cara yang dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi.

Berdasarkan teori sinyal (*signaling theory*) pemerintah sebagai penerima mandat/amanah dari rakyat akan berusaha untuk memberikan sinyal yang baik agar rakyat selalu mendukung kinerja pemerintah. Laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian internal, kelengkapan dalam pengungkapan, penjelasan detail dalam website merupakan bentuk nyata pemberian sinyal baik kepada rakyat. Dalam mengurangi asimetri informasi antara pemda dan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan sinyal baik berupa laporan keuangan yang meyakinkan (Trisnawati & Achmad, 2014).

3. Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2004) yang dikutip dalam Yahya (2006) menyebutkan bahwa akuntabilitas publik dapat didefinisikan sebagai pengungkapan dan pemberian informasi atas kegiatan dan kinerja keuangan daerah kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Pemberian informasi dan pengungkapan tersebut dilakukan agar dapat terpenuhinya hak-hak publik yang terdiri dari hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be kept information*), serta hak untuk didengar dan mendengar aspirasi (*right to be heard and to be listened to*).

Menurut Oxford Dictionary (2003) yang dikutip dari Fatemi & Behmanesh (2012) akuntabilitas publik didefinisikan sebagai kewajiban seseorang untuk menggambarkan dan memberikan alasan yang logis tentang tindakan yang dilakukan. Dengan kata lain akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi orang yang melaksanakannya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan guna memenuhi tanggung jawab atas apa yang telah dikerjakannya dan menyediakan laporan yang diperlukan.

Dalam Sadjiarto (2000) disebutkan bahwa akuntabilitas dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari **aspek akuntansi**, *American Accounting Association* menjelaskan bahwa akuntabilitas pemerintah meliputi empat hal yaitu akuntabilitas terhadap:

1. Sumber Daya Keuangan
2. Ketaatan terhadap peraturan hukum dan administratif
3. Efisiensi dan keekonomisan suatu program
4. Keberhasilan program pemerintah dalam mencapai tujuan, manfaat dan efektivitas

Sedangkan dalam **aspek fungsional** akuntabilitas meliputi lima tahap yaitu:

1. *Probity and legality accountability*, pertanggungjawaban atas pemakaian dana yang telah sesuai dengan anggaran dan peraturan undang-undang yang berlaku (*compliance*)
2. *Process accountability*, meliputi prosedur untuk pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari proses *planning*, *allocating* dan *managing*.
3. *Perfomance accountability*, apakah program atau kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi kriteria efisien (*efficient and economy*).
4. *Program accountability*, berfokus pada penetapan serta pencapaian tujuan (*outcomes & effectiveness*)
5. *Policy accountability*, penentuan kebijakan apa yang akan diterapkan (*value*)

Dalam aspek **sistem akuntabilitas**, terdapat beberapa ciri-ciri system akuntabilitas yaitu:

1. Fokus pada hasil
2. Penggunaan beberapa indikator untuk mengukur kinerja
3. Menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan atas suatu program atau kegiatan
4. Memberikan data yang bersifat konsisten
5. Melaporkan dan mempublikasikan hasil secara teratur

Menurut Mardiasmo (2004) yang dikutip dari Yahya (2006) menyebutkan bahwa terdapat dua macam akuntabilitas yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas internal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal yang memiliki kepentingan misalnya pihak legislatif atau pejabat pengelola keuangan negara. Akuntabilitas eksternal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak luar misalnya investor, kreditor dan pembayar pajak.

Akuntabilitas dalam pemerintahan yang berpedoman pada demokrasi mengakui bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rakyat atas semua kegiatan yang dilaksanakan, sebab pemerintah dalam mengatur dan menjalankan pemerintahannya mengambil sumber daya dari masyarakat.

Kepala Daerah diwajibkan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagai lembaga legislatif yang berkedudukan sebagai wakil rakyat yang sudah diberikan amanah untuk mengawasi pengelolaan sumber daya daerah pada setiap akhir anggaran maupun akhir periode pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk dari akuntabilitas pemerintah (Yahya, 2006).

4. Pengungkapan Laporan Keuangan

a. Pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan atau penyajian informasi yang sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh standar akuntansi atau peraturan pihak terkait (Suwardjono, 2013: 583)

b. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Pengungkapan Sukarela merupakan pengungkapan atau penyajian informasi yang diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau pihak terkait (Suwardjono, 2013: 583)

5. Pelaporan Keuangan melalui Internet

Perkembangan pelaporan keuangan melalui internet merupakan perkembangan dari perkembangan praktik akuntansi sekalipun praktik tersebut tidak didasari dengan standar pengungkapan informasi keuangan berbasis internet. Penggunaan internet mampu mengurangi keterbatasan

karena adanya perbedaan wilayah serta mampu meningkatkan frekuensi penyajian informasi kepada publik secara cepat (Almilia, 2008).

Pemerintah telah mulai memanfaatkan fasilitas internet untuk menyampaikan informasi kepada publik. Menurut Mardiasmo (2009) semakin cepat pengungkapan laporan keuangan maka semakin baik untuk membantu dalam pengambilan keputusan (Rahman & Budiatmanto, 2013). Pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan menggunakan internet termasuk dalam pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 pasal 3 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah menyatakan bahwa informasi terkait keuangan daerah yang disampaikan harus mencukupi kriteria relevan, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria tersebut tidak terlepas dari prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Menurut Mardiasmo (2009) dalam Rahman & Budiatmanto (2013) menyatakan bahwa akuntabilitas publik terbagi menjadi dua yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pihak yang memiliki kekuasaan lebih tinggi sedangkan akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam PP 56 tahun 2005 pasal 12 disebutkan bahwa salah satu tujuan dari

penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat.

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 mengenai Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyajikan informasi keuangan melalui website resminya masing-masing. Poin – poin yang harus disampaikan adalah:

1. Ringkasan RKA SKPD
2. Ringkasan RKP PPKD
3. Rancangan Perda APBD
4. Rancangan Perda Perubahan APBD
5. Perda APBD
6. Perda Perubahan APBD
7. Ringkasan DPA SKPD
8. Ringkasan DPA PPKD
9. LRA SKPD
10. LRA PPKD
11. LKPD yang telah diaudit
12. Opini BPK atas LKPD.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Kompetisi Politik

Menurut Barber (1983); Evans dan Patton (1987) dalam Laswad (2005) tingginya tingkat persaingan politik meningkatkan biaya jangka panjang bagi pejabat terpilih untuk memenuhi janji-janji pra-pemilu, dan memotivasi pemegang jabatan untuk menanggung biaya monitoring (*monitoring cost*) yang tinggi. Adanya kompetisi politik yang tinggi dalam pemda memunculkan pengawasan yang lebih besar baik dari saingan politik maupun masyarakat (Trisnawati & Achmad, 2014).

Kompetisi politik yang tinggi mendorong pejabat pemegang kekuasaan pada saat itu untuk mempublikasikan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Semakin tinggi kompetisi politik akan membuat pemerintah beralih menggunakan internet sebagai media untuk mempublikasikan laporan keuangan karena keunggulan dari segi biaya dan aksesibilitasnya (Andriani, 2015).

Penelitian Trisnawati & Achmad (2014), Rahman et al (2013) menyatakan bahwa kompetisi politik dalam suatu pemda memengaruhi publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui website. Sedangkan menurut Sinaga (2011) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh secara positif dan signifikan kompetisi politik terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Dari uraian diatas peneliti membuat hipotesis :

H₁ : Kompetisi politik berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) melalui internet.

2. Rasio Pembiayaan Utang (Leverage)

Leverage menunjukkan seberapa besar jumlah aset milik pemerintah yang didanai menggunakan dana pinjaman dari pihak lain (Sinaga & Probowo, 2011). Semakin tinggi *leverage* maka perusahaan akan meningkatkan pengungkapan kepada stakeholder baik secara tradisional maupun menggunakan media informasi seperti website (Jensen and Meckling, 1976 dalam Almilia, 2008)

Besarnya *leverage* suatu pemda mengindikasikan bahwa pemda tersebut dalam melaksanakan pembangunan daerahnya memiliki ketergantungan dana dari pemberi pinjaman (Hudoyo, 2014). *Leverage* yang tinggi akan meningkatkan tingkat pengawasan serta jumlah informasi yang dibutuhkan oleh pemberi pinjaman dana (Trisnawati & Achmad, 2014). Pemerintah akan berusaha memenuhi kebutuhan dari pemberi pinjaman dengan semakin banyak mempublikasikan laporan keuangannya. Kemudian untuk menekan biaya pemerintah akan memilih media yang murah namun tetap efisien. Internet merupakan media yang murah dan memberi kemudahan dalam pengaksesan laporan keuangan pemerintah. Sehingga *leverage* yang tinggi akan semakin meningkatkan penggunaan internet untuk melaporkan laporan keuangan.

Penelitian Trisnawati & Achmad (2014), Rahman & Budiarmanto (2013) menyatakan bahwa rasio pembiayaan utang (*leverage*) memengaruhi pelaporan keuangan melalui internet. Sedangkan penelitian Sinaga (2011), Hudoyo & Mahmud (2014) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh *leverage* terhadap pelaporan keuangan melalui internet. Dari uraian diatas peneliti membuat hipotesis yaitu :

H₂ : Leverage berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) melalui internet

3. Ukuran Pemda (*Size*)

Ukuran organisasi yang semakin besar mengindikasikan bahwa organisasi tersebut memiliki lebih banyak aturan dan ketentuan (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Suatu pemda yang memiliki ukuran yang besar akan lebih dituntut mengenai keterbukaan atas pengelolaan laporan keuangannya sebagai bukti atas akuntabilitas publik (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Pemda yang besar akan mempublikasikan laporan keuangan menggunakan media internet karena memiliki tata kelola keuangan yang lebih rumit sehingga tingkat pengawasan juga akan semakin tinggi (Trisnawati & Achmad, 2014).

Penelitian Medina (2012) menunjukkan bahwa semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu pemda maka pemda tersebut akan menyajikan informasi terkait keuangan daerahnya pada situs resminya. Sedangkan penelitian Sinaga (2011) menunjukkan bahwa ukuran suatu pemda tidak

memengaruhi pelaporan keuangan melalui internet. Dari uraian diatas peneliti membuat hipotesis :

H₃ : Ukuran pemda berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) melalui internet.

4. Opini Audit

Opini BPK dapat menjadi indikator yang digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas entitas pemerintah, sehingga dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (Marfiana & Kurniasih, 2013). Pemda dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) akan mempublikasikan laporan keuangannya menggunakan media internet untuk mengisyaratkan bahwa pemda telah melakukan pengelolaan keuangan secara baik serta dapat dipertanggungjawabkan (Trisnawati & Achmad, 2014).

Penelitian Hilmi dan Martani (2012) yang menyatakan bahwa tingkat penyimpangan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Penelitian Trisnawati & Achmad (2014) menyimpulkan bahwa opini audit yang didapat suatu pemda tidak memiliki pengaruh langsung terhadap publikasi laporan keuangan melalui internet. Dari uraian diatas peneliti membuat hipotesis yaitu :

H₄ : Opini audit berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) melalui internet.

5. Kompleksitas Pemda

Kompleksitas pemda diukur berdasarkan jumlah penduduk (Puspita, 2012). Populasi penduduk yang semakin besar membuat pemerintah menanggung tanggung jawab yang besar untuk memenuhi pelayanan publik (Pratama, Werastuti, & Sujana, 2015). Menurut Ingram yang dikutip dari Hilmi (2010) semakin kompleks pemerintahan akan memotivasi pemerintah untuk melakukan publikasi laporan keuangan.

Semakin kompleks populasi dalam suatu pemda akan meningkatkan pengawasan dari masyarakat terkait dengan kinerja pemda. Semakin besar penduduk maka pemerintah terdorong untuk mengungkapkan laporan keuangan sebagai bentuk pelayanan publik dan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Semakin besar jumlah penduduk mendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkan laporan keuangan yang mudah untuk diakses tanpa mengeluarkan banyak biaya. Internet merupakan media yang mudah diakses dan murah.

Penelitian Puspita (2012) menunjukkan bahwa kompleksitas pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemda. Penelitian Andriani (2015) menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak terbukti signifikan mempengaruhi tingkat Pengungkapan informasi non keuangan dalam website. Dari uraian diatas maka peneliti membuat hipotesis :

H₅ : Kompleksitas pemda berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) melalui internet.

6. Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai aktivitas yang dapat meningkatkan partisipasi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara sosial maupun secara etis (Hariandja, 2002). Kompetensi sumber daya manusia merupakan karakteristik pegawai negeri sipil yang meliputi pengetahuan, keterampilan serta perilaku yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya (Andini & Yusrawati, 2013). Kapasitas sumber daya manusia di instansi pemerintah masih belum memadai untuk memenuhi keandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan dilihat bila dilihat dari banyaknya permasalahan yang terjadi pada laporan keuangan pemerintah (Andriani, 2012).

Semakin baik kualitas sumber daya manusia dalam instansi pemerintahan akan meningkatkan kinerja pemerintah dalam melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah mengungkapkan kinerja yang dicapai melalui laporan keuangan. Agar laporan keuangan dapat sampai kepada masyarakat dengan biaya yang murah dan efisien pemerintah akan memilih internet sebagai media publikasi laporan keuangan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia mencerminkan bahwa tingkat pendidikan

pegawai semakin baik sehingga mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi.

Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka tingkat pengungkapan laporan keuangan melalui internet juga semakin tinggi. Sumber Daya Manusia diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak (www.bps.go.id).

Penelitian Ariesta (2013) dan Andriani (2012) membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Andini & Yusrawati (2013) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dari uraian diatas maka peneliti membuat hipotesis:

H₆ : Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) melalui internet.

7. Gaya Kepemimpinan

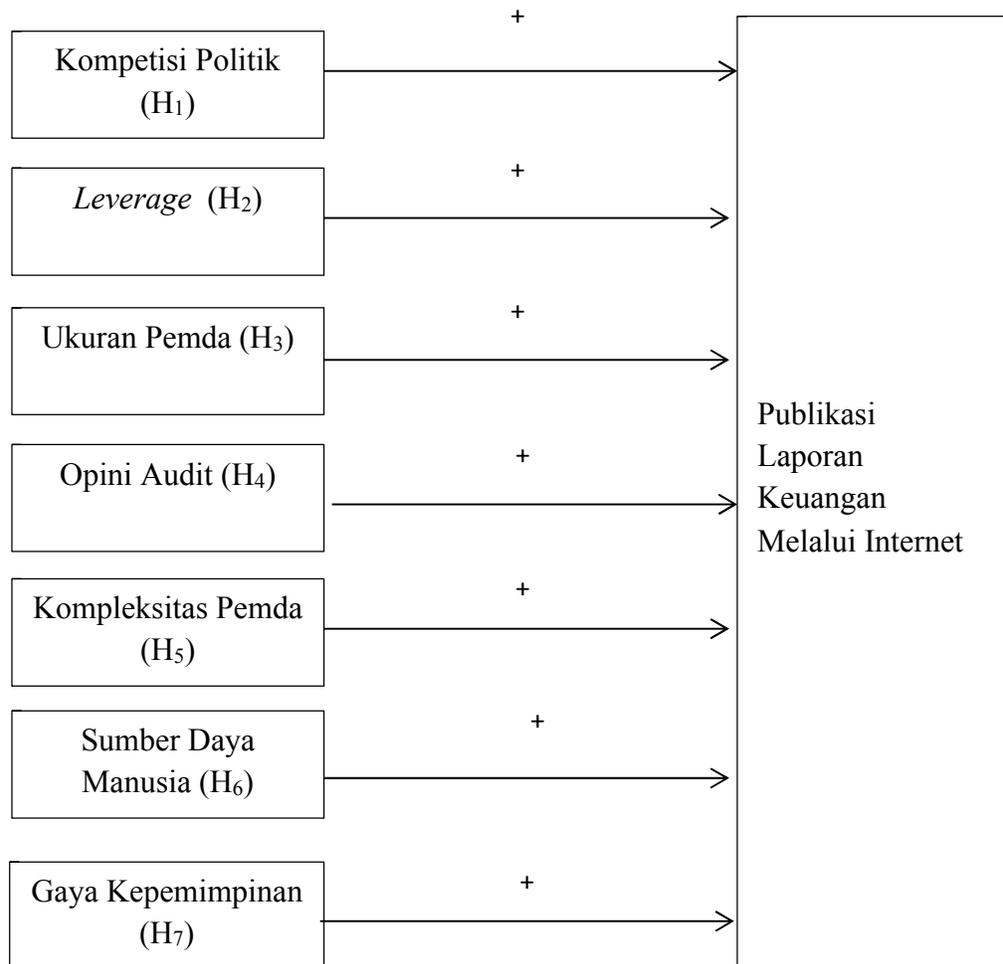
Kepemimpinan publik memiliki pengaruh dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi sektor publik dan serta dalam mencapai tujuan organisasi (Gani, 2007). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD maupun masyarakat terkait dengan pelaksanaan APBD (Pradipa, Dwija & Ratnadi, 2016). Publikasi LKPD secara lebih transparan mencerminkan

kinerja pemerintah yang baik dan bertanggung jawab. Menurut Akbar (2015) gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai bila dibandingkan dengan gaya kepemimpinan transaksional. Dengan gaya kepemimpinan transformasional pegawai akan bekerja lebih baik dalam melakukan pelayanan publik dimana diwujudkan dalam transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Bentuk transparansi LKPD salah satunya dilakukan dengan melakukan publikasi menggunakan media internet dimana internet merupakan media yang terjangkau dan mudah untuk diakses.

Penelitian Akbar (2015) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Sedangkan penelitian Ratnamasih (2015) menyatakan bahwa menunjukkan kepemimpinan transaksional lebih berperan dalam meningkatkan kinerja pegawai Bappeda Kota Bandung. Dari uraian diatas peneliti membuat hipotesis :

H₇ : Gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) melalui internet.

C. Model Penelitian



D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Hasil Arah dan Signifikansi Penelitian Sebelumnya

Peneliti	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
Laswad et al (2005)	<i>Internet Financial Reporting (IFR)</i>	Kompetensi Politik, ukuran pemda, <i>leverage</i> , <i>wealth</i> , visibilitas pers, dan tipe pemda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat hubungan signifikan positif <i>leverage</i>, <i>wealth</i> dan visibilitas pers terhadap IFR 2. Terdapat hubungan signifikan negative tipe pemda terhadap IFR 3. Tidak terdapat hubungan signifikan ukuran dan kompetisi politik terhadap IFR
Styles dan Tennyson (2007)	Ketersediaan dan aksesibilitas data finansial pada situs pemerintah	Ukuran daerah, struktur pemda, kualitas <i>accounting disclosure</i> , pendapatan per kapita, tingkat hutang dan kondisi finansial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat hubungan positif signifikan ukuran daerah, kualitas <i>accounting disclosure</i>, pendapatan perkapita, dan tingkat hutang terhadap ketersediaan data finansial pada situs pemerintah 2. Terdapat hubungan positif signifikan ukuran daerah, pendapatan perkapita dan tingkat hutang terhadap aksesibilitas data finansial pada situs pemerintah.

Peneliti	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
Trisnawati & Ahmad (2014)	Publikasi laporan keuangan pemda melalui internet	Kompetisi politik, ukuran pemda, <i>leverage</i> , kekayaan pemda, tipe pemda dan opini audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetisi politik, <i>leverage</i>, ukuran pemda dan kekayaan pemda berpengaruh positif signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet. 2. Tipe pemda dan opini audit tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet.
Nosihana,A. & Yaya, R. (2016)	Internet Financial Reporting (IFR)	Kompetisi Politik, Ukuran Pemda, Rasio Pembiayaan Utang (<i>leverage</i>), Kekayaan Pemda, Tipe Pemda, Opini Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetisi Politik berpengaruh positif signifikan terhadap publikasi laporan keuangan melalui internet. 2. Ukuran Pemda berpengaruh positif signifikan terhadap publikasi laporan keuangan.